

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya yang merupakan hasil dari penelitian pada Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan dana PEM dalam upaya menekan terjadinya pinjaman dana PEM bermasalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian :

1. Pelaksanaan pengawasan dana PEM yang dilakukan di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dapat dikatakan buruk dan masih perlu beberapa perbaikan pada beberapa aspek pengawasan seperti :
  - a. Pemberlakuan survei *on the spot* bagi setiap penerima dana PEM baik yang baru pertama kali melakukan pinjaman dana maupun bagi yang melakukan pinjaman dana kesekian kalinya. Analisis ini bertujuan untuk melihat keadaan sebenarnya dari usaha penerima pinjaman dana PEM
  - b. Pengawasan secara aktif setelah pinjaman modal kerja di cairkan. Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pinjaman yang bermasalah

2. Pemberian hibah dari Pemerintah Kota Kupang berupa pinjaman dana PEM untuk masyarakat Kota Kupang ini memang dinilai baik, karena tidak memiliki bunga pinjaman yang sama sekali tidak memberatkan masyarakat. Disertai dengan Juklak yang telah ditetapkan oleh Walikota Kupang guna tercapainya pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Kupang. Untuk itu perlu di tingkatkan lagi kesadaran pengawasan dana PEM yang lebih efektif dilakukan oleh pihak-pihak yang tunjuk oleh Walikota Kupang seperti DPRD Kota Kupang, Tim Teknis dan Camat Maulafa, Lurah Fatukoa dan RT/RW serta masyarakat yang berada di Kelurahan Fatukoa. Dengan diberlakukannya pengawasan secara teratur sesuai dengan Juklak yang ditetapkan oleh Walikota Kupang, penulis meyakini bahwa pengelolaan dana PEM di Kelurahan Fatukoa akan berjalan dengan baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas penulis mencoba memberikan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan dana PEM bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut saran-saran dari peneliti :

1. Melakukan himbauan kepada pengawas yang belum mengetahui fungsinya terhadap pengawasan dana PEM seperti RT/RW dan masyarakat di Kelurahan Fatukoa tentang pentingnya pengawasan terhadap dana PEM

2. Peningkatan pengawasan dana PEM mulai dari proses pengajuan proposal sebagai tahap awal hingga pada penggunaan dana PEM agar terciptanya penyaluran, pengembalian dan pengguliran dana PEM sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Kupang
3. Memberikan sanksi sesuai dengan Keputusan Walikota Kupang kepada penerima Dana PEM yang lalai melakukan kewajibannya sebagai peminjam Dana PEM

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastians, Indra.2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yokyakarta: Erlanggas
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto.2015. *Akuntansi Keuangan Daerah;Basis Akrual*.Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Muhammmad Syam Kusifi.2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko, T Hani. 1984. *Manajemen Edisi 2*, BPFE. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 tentang perubahan ketiga atas keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang
- Manullang, M.2015. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mahmudi. 2010. *ManajemenKeuangan Daerah*.Jakarta : Erlangga
- Terry, George R dan Leslie W Rue. *Principles Of Management*. Jakarta: Bina Aksara
- Tungga Ananta, Komang Saputra dan Diota Vijaya.*Metodologi Penelitian Bisnis*. Yokyakarta : Graha Ilmu
- Panduan Penulisan Skripsi oleh Dosen-Dosen Program Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

**Skripsi :**

Fanggidae, Frits MS dan Ronald Fanggidae.2016.*Dampak Implementasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.*Kupang

Handayani, Nurul.2014.*Analisis Pengelolaan Dana Bergulir pada UPK Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya*

Sumampow, YovinceYohana.2016.*AnalisisPengelolaan Dana Bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Maulafa Kota Kupang Provinsi NTT.*Kupang :Skripsi Kerasipan Fakultas Ekonomi, Unwira

**Rujukan Dari Internet :**

<http://makalah-dudi.blogspot.com/2016/10/efektivitas-pelaksanaan-programS.danapem.html&hl=id-ID> (diakses tgl 22 Juli 2018)s